



KABUPATEN LAMONGAN

INOVASI

**Sistem Online Pengajuan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah
berbasis Android (SiOPPAH)**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
INOVASI DAERAH**

INOVASI

**Sistem Online Pengajuan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah
berbasis Android (SiOPPAH)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Proses perumusan produk hukum daerah antara keputusan dengan peraturan mempunyai mekanisme pentahapan yang berbeda. Keputusan proses pembentukannya dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, sedangkan untuk peraturan proses pembentukannya harus dilakukan dengan tahapan yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, fasilitasi Gubernur, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Adapun permasalahan yang sering dihadapi Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebelum proses penyusunan produk hukum daerah adalah pada tahap perencanaan, dimana pengajuan rancangan produk hukum daerah selama ini dilakukan dengan cara pengusulan draf rancangan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan harus secara langsung disampaikan kepada Bupati Lamongan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum.

Apabila rancangan produk hukum daerah tidak disampaikan bersama dengan *softcopy*, maka proses pengetikan manual terpaksa dilakukan oleh tim penyusun. Proses pengajuan secara manual tersebut mengakibatkan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa maupun tim penyusun tidak dapat mengupdate secara cepat usulan baru dan tidak dapat memantau sejauh mana proses pentahapan produk hukum daerah yang diusulkan sudah diselesaikan. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan atau kendala yang sering terjadi khususnya pada tahap perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, antara lain sebagai berikut:

1. **Keterbatasan Monitoring Real-Time:** Perangkat Daerah tidak dapat melakukan monitoring secara *real-time* terhadap rancangan pembentukan produk hukum daerah, sehingga berdampak kepada penelusuran manual yang menyita waktu dan tidak efisien.
2. **Proses Penelusuran yang Lambat:** Penelusuran dan pencarian naskah dilakukan secara manual sehingga Bagian Hukum membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan jawaban yang pasti terkait sejauh mana tahapan proses pengajuan produk hukum daerah sudah dilakukan.

3. **Kesulitan Mengontrol Produk Hukum di Tingkat Desa:** Sulitnya mengontrol produk hukum pada tingkat desa yang dievaluasi oleh kecamatan.
4. **Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi yang Manual:** Pada tahap permohonan pengajuan produk hukum daerah yang bersifat peraturan (*regeling*) wajib dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selama ini masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, anggaran, dan waktu yang lama.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan pesat dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan. Teknologi informasi mempunyai pengaruh besar dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal pembentukan produk hukum daerah.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi kebijakan nasional yang mendorong seluruh instansi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam konteks pembentukan produk hukum daerah, pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat proses pengajuan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan pemantauan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan kondisi tersebut, inovasi SIOPPAH (Sistem Online Pengajuan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah berbasis Android) dirancang sebagai upaya menghadirkan sistem aplikasi yang terintegrasi, mudah diakses, dan dapat memantau secara *real-time* proses pengajuan dan pemantauan produk hukum daerah. Inovasi ini diharapkan menjadi sarana pengelolaan dan penyediaan informasi yang lebih efektif, mempercepat akses terhadap dokumen penting, meningkatkan ketertiban administrasi, mendukung budaya kerja *paperless*, serta memperkuat mutu tata kelola pembentukan produk hukum daerah secara berkelanjutan. Dengan adanya SIOPPAH, proses pengajuan dan pemantauan produk hukum daerah di Kabupaten Lamongan diharapkan menjadi lebih efisien, responsif, akuntabel, dan selaras dengan arah transformasi digital pelayanan publik.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bagian Hukum

Tujuan ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan melalui:

- Penyediaan layanan pengajuan produk hukum yang cepat dan mudah
- Peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan Perangkat Daerah
- Standarisasi prosedur pengajuan dan pemantauan produk hukum daerah

2. Terciptanya Sistem Aplikasi dalam Proses Pengajuan dan Pemantauan

Tujuan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam proses pengajuan dan pemantauan naskah produk hukum daerah, meliputi:

- Digitalisasi seluruh proses pengajuan produk hukum daerah
- Penyediaan platform berbasis web dan Android yang mudah diakses
- Otomatisasi alur kerja dan notifikasi status

3. Pengendalian Real-Time oleh Perangkat Daerah

Tujuan ini memungkinkan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengontrol pengajuan dan pemantauan naskah produk hukum secara *real-time*, meliputi:

- Monitoring status usulan secara langsung
- Akses informasi perkembangan produk hukum kapan saja
- Kemudahan dalam melacak posisi dokumen

4. Integrasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tujuan ini mewujudkan integrasi proses tahap pembentukan produk hukum daerah yang bersifat peraturan (*regeling*) dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, meliputi:

- Digitalisasi koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Provinsi
- Pengurangan waktu dan biaya administrasi
- Peningkatan efisiensi proses fasilitasi

5. Pengendalian Status Melalui Sistem Aplikasi

Tujuan ini memungkinkan setiap perubahan status dari masing-masing bagian dapat dikontrol melalui sistem aplikasi platform *Web-Based* dan aplikasi Android, meliputi:

- Notifikasi otomatis setiap perubahan status
 - Riwayat proses yang terdokumentasi dengan baik
 - Kemudahan monitoring dan evaluasi
-

C. MANFAAT

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik

- **Mempercepat** proses pengajuan, pemeriksaan, dan pemantauan produk hukum daerah
- **Mengurangi** waktu penyelesaian administrasi dibandingkan proses manual
- **Memberikan** pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan responsif kepada Perangkat Daerah

2. Mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pembentukan Produk Hukum Daerah

- Seluruh proses pengajuan dan pemantauan dilakukan secara elektronik melalui platform web dan aplikasi Android
- **Mengurangi** penggunaan dokumen fisik (*paperless*)
- **Meningkatkan** keamanan dan ketersediaan arsip dokumen secara digital

3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Proses Layanan

- Setiap tahapan pembentukan produk hukum dapat dipantau secara *real-time*
- Riwayat proses, status, dan tindak lanjut terdokumentasi dengan baik
- **Memudahkan** monitoring serta evaluasi kinerja pelayanan di Bagian Hukum

4. Mempermudah Koordinasi Antar Perangkat Daerah

- Perangkat Daerah dapat mengetahui posisi dan perkembangan usulan produk hukum tanpa harus datang langsung ke Bagian Hukum
- **Mengurangi** kesalahan komunikasi serta mempercepat penyampaian informasi
- **Meningkatkan** kolaborasi antar instansi yang terlibat dalam penyusunan produk hukum

5. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Proses

- Setiap perubahan status dapat dipantau oleh pihak yang berkepentingan melalui web maupun aplikasi Android
- **Memudahkan** pimpinan dalam melakukan monitoring terhadap progres penyelesaian produk hukum
- **Menjadi** dasar pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini

6. Meningkatkan Kepastian Waktu Penyelesaian Layanan

- Pemohon memperoleh informasi perkembangan usulan secara langsung
- **Meminimalkan** keterlambatan akibat kurangnya informasi mengenai posisi dokumen
- **Mendorong** penyelesaian produk hukum sesuai target waktu yang telah ditetapkan

7. Mendukung Penerapan Prinsip Good Governance

- **Mendorong** penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi
- **Meningkatkan** kualitas tata kelola pelayanan pembentukan produk hukum daerah
- **Mendukung** implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Inovasi SIOPPAH hadir sebagai respons cepat terhadap kebutuhan sistem pengajuan dan pemantauan produk hukum daerah yang efektif, efisien, dan transparan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Proses penciptaannya dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat. Kecepatan penciptaan inovasi ini ditandai oleh beberapa aspek utama:

1. Identifikasi Masalah yang Cepat dan Relevan

Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan cepat mengidentifikasi bahwa proses pengajuan dan pemantauan produk hukum daerah yang masih manual menimbulkan berbagai kendala, seperti lambatnya proses, ketidakmampuan monitoring *real-time*, sulitnya mengontrol produk hukum di tingkat desa, serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi yang masih manual. Hal ini mendorong pencarian solusi teknologi yang praktis dan terintegrasi.

2. Pemanfaatan Platform dan Teknologi yang Siap Pakai

SIOPPAH dibangun dengan memanfaatkan teknologi *web-based* dan aplikasi Android yang responsif dan andal, meliputi:

- Platform web untuk pengelolaan dan pemantauan oleh administrator
- Aplikasi Android untuk kemudahan akses oleh Perangkat Daerah
- Sistem database terpusat untuk integrasi data
- Teknologi notifikasi untuk memudahkan pemantauan status

3. Pengembangan oleh Tim Internal yang Kompeten

Inovasi ini dikembangkan oleh tim internal Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan dukungan dari para pemangku kepentingan terkait. Hal ini memungkinkan percepatan proses pengembangan karena pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan bisnis dan regulasi yang berlaku.

4. Penyusunan Arsitektur Sistem yang Terstruktur

SIOPPAH dirancang dengan arsitektur yang mencakup:

- Modul pengajuan produk hukum daerah
- Modul pemantauan status dan perkembangan
- Modul notifikasi dan peringatan
- Modul pelaporan dan dokumentasi
- Sistem keamanan dan otorisasi hak akses

5. Respons Cepat terhadap Perubahan Kebutuhan

Sistem ini dirancang fleksibel sehingga dapat disesuaikan dan diperbarui sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, perubahan regulasi, atau umpan balik dari pengguna.

Secara keseluruhan, SIOPPAH menunjukkan bahwa inovasi di bidang pelayanan publik tidak selalu memerlukan waktu lama atau biaya besar untuk diwujudkan. Dengan perencanaan yang matang, pemanfaatan teknologi yang tepat, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, proses penciptaan inovasi dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lamongan.

BAB II

KERANGKA BERPIKIR

A. KEBAHARUAN

Inovasi SIOPPAH (Sistem Online Pengajuan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah berbasis Android) menghadirkan kebaruan dalam pelayanan publik, khususnya dalam hal pengajuan dan pemantauan produk hukum daerah di Kabupaten Lamongan. Kebaruan inovasi ini terletak pada cara Bagian Hukum Sekretariat Daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Beberapa bentuk kebaruannya meliputi:

1. Digitalisasi Sistem Pengajuan dan Pemantauan Produk Hukum

Berbeda dengan sistem manual yang hanya mengandalkan dokumen fisik dan penyampaian langsung, SIOPPAH memanfaatkan **sistem digital berbasis web dan Android** yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ini memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam proses pengajuan dan pemantauan produk hukum daerah.

2. Monitoring Real-Time oleh Perangkat Daerah

SIOPPAH memungkinkan Perangkat Daerah untuk melakukan monitoring secara *real-time* terhadap rancangan pembentukan produk hukum daerah. Setiap perubahan status dari masing-masing bagian dapat dikontrol melalui sistem aplikasi, sehingga Perangkat Daerah dapat mengetahui posisi dan perkembangan usulan produk hukum tanpa harus datang langsung ke Bagian Hukum.

3. Integrasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SIOPPAH mengintegrasikan proses tahap pembentukan produk hukum daerah yang bersifat peraturan (*regeling*) dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini memungkinkan digitalisasi koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Provinsi, mengurangi waktu dan biaya administrasi, serta meningkatkan efisiensi proses fasilitasi.

4. Pengendalian Produk Hukum di Tingkat Desa

SIOPPAH memungkinkan pengendalian produk hukum di tingkat desa yang dievaluasi oleh kecamatan. Dengan sistem ini, produk hukum di tingkat desa dapat dikontrol secara cepat oleh Bagian Hukum.

5. Transparansi dan Akuntabilitas Proses

SIOPPAH meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses layanan melalui:

- Setiap tahapan pembentukan produk hukum dapat dipantau secara *real-time*
- Riwayat proses, status, dan tindak lanjut terdokumentasi dengan baik
- Memudahkan monitoring serta evaluasi kinerja pelayanan di Bagian Hukum

6. Paperless dan Ramah Lingkungan

Inovasi ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang ramah lingkungan melalui:

- Pengurangan penggunaan kertas dalam pengajuan dan pemantauan
- Digitalisasi seluruh dokumen produk hukum daerah
- Efisiensi penggunaan sumber daya

7. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Inovasi

Indikator/Aspek	Sebelum Ada Inovasi	Sesudah Ada Inovasi (SIOPPAH)
Metode Pengajuan	Pengusulan draf secara langsung ke Bupati dengan tembusan ke Bagian Hukum	Pengajuan melalui sistem aplikasi berbasis online yang dapat diakses kapan saja
Monitoring	Perangkat Daerah tidak dapat melakukan monitoring secara real-time	Produk hukum dapat dipantau secara cepat melalui sistem aplikasi berbasis online
Waktu Penyelesaian	Proses memakan waktu lama karena penelusuran manual	Proses lebih cepat dengan sistem terintegrasi dan notifikasi otomatis
Koordinasi dengan Provinsi	Dilakukan secara manual membutuhkan tenaga, anggaran, dan waktu lama	Digitalisasi koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Provinsi
Kontrol Produk	Sulit mengontrol produk	Produk hukum di tingkat desa

Indikator/Aspek	Sebelum Ada Inovasi	Sesudah Ada Inovasi (SIOPPAH)
Hukum Desa	hukum di tingkat desa	dapat dikontrol secara cepat oleh Bagian Hukum
Transparansi	Kurang transparan, sulit mengetahui status usulan	Setiap tahapan dapat dipantau secara real-time dan terdokumentasi

B. DESAIN INOVASI

Desain inovasi SIOPPAH (Sistem Online Pengajuan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah berbasis Android) dirancang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pengajuan dan pemantauan produk hukum daerah melalui pendekatan digital yang terintegrasi. Inovasi ini menggabungkan sistem pengelolaan dokumen, pemantauan status, dan notifikasi dalam satu platform berbasis web dan Android. Desain SIOPPAH mencakup beberapa komponen utama:

1. Arsitektur Sistem

SIOPPAH dibangun dengan arsitektur yang mencakup:

- **Platform Web:** Untuk pengelolaan dan pemantauan oleh administrator (Bagian Hukum)
- **Aplikasi Android:** Untuk kemudahan akses oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan
- **Database Terpusat:** Untuk integrasi data seluruh produk hukum daerah
- **Sistem Notifikasi:** Untuk memberitahu perubahan status secara otomatis

2. Modul Sistem

Sistem terbagi menjadi beberapa modul utama:

a. Modul Pengajuan:

- Pengajuan rancangan produk hukum daerah oleh Perangkat Daerah
- Upload dokumen pendukung
- Validasi kelengkapan dokumen

b. Modul Pemantauan:

- Monitoring status dan perkembangan produk hukum

- Riwayat proses dan perubahan status
- Notifikasi perubahan status

c. Modul Administrasi (Bagian Hukum):

- Verifikasi dan validasi pengajuan
- Pengelolaan alur proses produk hukum
- Penetapan status dan tindak lanjut

d. Modul Pelaporan:

- Rekapitulasi produk hukum daerah
- Laporan kinerja dan capaian
- Dokumentasi arsip digital

3. Fitur Utama

a. Pengajuan Online:

- Form pengajuan yang terstruktur dan user-friendly
- Upload dokumen pendukung
- Validasi otomatis kelengkapan dokumen

b. Pemantauan Real-Time:

- Dashboard status usulan
- Notifikasi setiap perubahan status
- Riwayat proses yang terdokumentasi

c. Notifikasi Otomatis:

- Pemberitahuan perubahan status
- Peringatan tenggat waktu
- Informasi tindak lanjut yang diperlukan

d. Keamanan dan Otorisasi:

- Autentikasi pengguna berbasis username dan password
- Manajemen hak akses berbasis peran (*role-based access*)
- Enkripsi data untuk keamanan informasi

4. Antarmuka Pengguna

SIOPPAH dirancang dengan antarmuka yang:

- **Responsif:** Dapat diakses dari berbagai perangkat (desktop, tablet, smartphone)
- **Intuitif:** Mudah digunakan dengan navigasi yang jelas

- **Informatif:** Menampilkan informasi status yang jelas dan akurat
- **Aksesibel:** Mendukung kemudahan akses bagi semua pengguna

5. Dokumentasi dan Panduan

Untuk memastikan keberlanjutan operasional, SIOPPAH dilengkapi dengan:

- **Panduan Pengguna** untuk petunjuk penggunaan bagi Perangkat Daerah
- **Panduan Administrator** untuk pengelolaan teknis
- **Pelatihan SDM** internal untuk memastikan seluruh pengguna memahami sistem
- **Jadwal pemeliharaan** dan pembaruan sistem secara berkala

C. PROSES/TAHAPAN PENERAPAN INOVASI

Proses penerapan inovasi SIOPPAH dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis, dimulai dari uji coba dan konsolidasi awal hingga penerapan dan pemantapan layanan. Tahapan ini dirancang untuk memastikan keberhasilan implementasi dan keberlanjutan sistem.

Tahap 1: Uji Coba dan Konsolidasi Awal (Januari)

Kegiatan:

1. Identifikasi kebutuhan sistem dan analisis proses bisnis saat ini
2. Perancangan arsitektur sistem dan desain database
3. Pengembangan aplikasi web dan Android
4. Uji coba internal (alpha testing) dan perbaikan bug
5. Uji coba terbatas (beta testing) dengan pengguna terpilih
6. Sosialisasi awal dan pengumpulan umpan balik
7. Perbaikan dan penyempurnaan sistem

Output:

- Aplikasi SIOPPAH versi awal siap uji coba
- Tim pengelola terlatih
- Dokumen panduan awal tersusun

Tahap 2: Persiapan Penerapan (Februari)

Kegiatan:

1. Penyusunan panduan penggunaan SIOPPAH

2. Sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh Perangkat Daerah
3. Persiapan infrastruktur dan database
4. Konfigurasi akun pengguna (User ID dan password)
5. Unggah data awal dan dokumentasi
6. Uji coba operasional dengan melibatkan Perangkat Daerah
7. Identifikasi kendala dan perbaikan

Output:

- Seluruh Perangkat Daerah terlatih menggunakan SIOPPAH
- Panduan penggunaan SIOPPAH tersusun
- Sistem siap diimplementasikan secara penuh

Tahap 3: Penerapan dan Pemantapan Layanan (Maret - seterusnya)

Kegiatan:

1. Implementasi SIOPPAH secara penuh untuk seluruh Perangkat Daerah
2. Monitoring penggunaan sistem dan pengumpulan umpan balik
3. Pelayanan pengajuan dan pemantauan produk hukum melalui SIOPPAH
4. Evaluasi berkala terhadap kinerja sistem
5. Perbaikan dan pengembangan berkelanjutan
6. Pengukuran capaian tujuan inovasi
7. Pengembangan fitur dan integrasi lebih lanjut

Output:

- SIOPPAH beroperasi secara penuh
- Seluruh produk hukum daerah terintegrasi dalam satu platform
- Budaya kerja digital dan pengelolaan produk hukum yang tertib terbentuk
- Kualitas pelayanan publik meningkat

D. PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

Proses inovasi yang dihasilkan dari SIOPPAH (Sistem Online Pengajuan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah berbasis Android) dimulai dari identifikasi tantangan dalam proses pengajuan dan pemantauan produk hukum daerah yang masih manual dan kurang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Bagian Hukum Sekretariat Daerah kemudian

menggagas pemanfaatan platform digital sebagai sistem sentral pengajuan dan pemantauan yang terintegrasi, mudah diakses, dan transparan.

Melalui proses kolaboratif, tim perancang merancang tampilan yang informatif dan menyusun arsitektur sistem berbasis kebutuhan Perangkat Daerah serta regulasi yang berlaku. Sistem dilengkapi dengan fitur pengajuan online, pemantauan real-time, notifikasi otomatis, dan generasi laporan, menjadikan SIOPPAH sebagai sumber informasi produk hukum yang andal. Inovasi ini diuji coba dalam beberapa tahap, dievaluasi bersama pengguna, dan dikembangkan secara berkelanjutan berdasarkan umpan balik.

Dengan pendekatan ini, SIOPPAH mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan, meningkatkan efisiensi operasional dan koordinasi antar Perangkat Daerah, serta memperkuat peran Bagian Hukum sebagai pengelola produk hukum daerah yang kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Penggunaan SIOPPAH memungkinkan Perangkat Daerah mengajukan rancangan produk hukum dan memantau perkembangannya secara real-time tanpa harus datang langsung ke Bagian Hukum. Sistem ini juga memungkinkan Bagian Hukum untuk mengontrol produk hukum di tingkat desa yang dievaluasi oleh kecamatan. Selain itu, SIOPPAH mengintegrasikan proses tahap pembentukan produk hukum daerah yang bersifat peraturan (*regeling*) dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, SIOPPAH menjadi solusi inovatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, inklusif, dan akuntabel di era digital.

BAB III

PENUTUP

Inovasi SIOPPAH (Sistem Online Pengajuan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah berbasis Android) merupakan terobosan kreatif dalam memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Lamongan. Melalui pemanfaatan sistem berbasis web dan Android, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dapat merancang sistem pengajuan dan pemantauan yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Inovasi ini mendorong terciptanya pengelolaan produk hukum daerah yang lebih efektif, efisien, serta mendukung kebutuhan pengambilan keputusan secara lebih cepat dan tepat.

Dengan pendekatan yang terstruktur namun berdampak besar, SIOPPAH telah membuka peluang baru dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah yang relevan dengan perkembangan zaman. Harapannya, inovasi ini dapat menjadi contoh praktik baik yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya, serta terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pelayanan publik ke depan. SIOPPAH bukan hanya sekadar sistem informasi, tetapi juga wujud nyata dari komitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang kreatif, adaptif, dan berpihak pada masyarakat.

Keberhasilan implementasi SIOPPAH juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Hukum, seluruh Perangkat Daerah, hingga masyarakat yang turut memberikan masukan dan apresiasi. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan inovasi serta memastikan bahwa sistem yang disajikan tetap relevan dan kontekstual dengan kebutuhan pembentukan produk hukum daerah. Di samping itu, inovasi ini mampu menumbuhkan semangat aparatur pemerintah untuk terus belajar dan berinovasi, menjadikan teknologi sebagai sahabat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kualitas pelayanan publik, SIOPPAH diharapkan mampu menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.



KABUPATEN LAMONGAN